

POLICY BRIEF

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI OPTIMALISASI HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH.

Oleh : Zulkifli Kaharu – PPUPD Ahli Pertama

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow pada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan nilai rata-rata **70,79**, predikat “**BB**”. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Perangkat Daerah sudah baik, meskipun dengan pencapaian ini, masih terdapat hal-hal mendasar yang penting menjadi catatan sebagai upaya perbaikan kedepan. Untuk itu disarankan kepada Bupati Bolaang Mongondow untuk mengambil kebijakan represif dan preventif dalam menyikapi hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang mongondow.

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan faktor penting sebagai bagian krusial dari tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, tata Kelola pemerintahan dapat berjalan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi. Salah satu yang menjadi alat ukur akuntabilitas pemerintahan daerah adalah melalui hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Evaluasi AKIP ini dapat memberikan gambaran sejauh mana Perangkat Daerah melakukan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta capaian kinerja. Dengan kata lain, melalui Evaluasi AKIP Perangkat Daerah ini pemerintah daerah yang dalam hal ini kepala daerah dan kepala Perangkat Daerah mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dengan berorientasi pada hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan pemerintah daerah. Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran dan perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya¹. Pelaksanaan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan hasil dengan standar dan tindakan koreksi berupa rekomendasi.

¹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan hasil evaluasi AKIP ini disampaikan kepada Perangkat Daerah yang kemudian melakukan tindak lanjut atas rekomendasi sebagai upaya perbaikan kinerja Perangkat Daerah. Selain itu, laporan evaluasi juga disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah daerah.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat dengan TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.²

Tujuan umum dari *policy brief* adalah untuk mendukung pembuatan kebijakan (pembuat Keputusan) berdasar informasi yang relevan (*informed evidence-based*) pada organisasi-organisasi yang relevan (memiliki wewenang untuk membuat kebijakan/membuat keputusan).³

DESKRIPSI MASALAH

1. Bagaimana dampak hasil evaluasi AKIP dalam upaya peningkatan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Apa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bagaimana Strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan Akuntabilitas melalui Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

ANALISIS

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, AKIP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun 2024 berada pada predikat “**B**” dengan nilai **65,35**. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Baik**”, yaitu **implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja**. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, AKIP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh nilai **64,56** dengan Predikat “**B**”.⁴

Hal ini membuktikan ada peningkatan capaian kinerja meskipun belum signifikan dan perlu adanya upaya perbaikan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow pada seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) Perangkat Daerah perolehan nilai dengan rata-rata nilai **70,79**. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional

³ Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan.

⁴ Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/432/AA.05/2024 Tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Halaman 2.

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rata-rata nilai ini menunjukkan bahwa **implementasi SAKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung**. dengan predikat **“BB”**.

Meskipun capaian ini sudah menggambarkan akuntabilitas yang baik, akan tetapi masih terdapat catatan penting yang harus menjadi perhatian utama oleh Kepala Daerah dan harus dilakukan perbaikan atau ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah. Dalam LHE AKIP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh KemenPAN RB Republik Indonesia terdapat rekomendasi yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. Secara garis besar catatan tersebut adalah perencanaan kinerja yang belum mengurai isi strategis Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow serta penyusunan *Critical Success Factor* (CSF) belum menjabarkan faktor pendorong yang relevan. Pengukuran kinerja dengan indikator kinerja utama yang belum memenuhi kriteria SMART. Pelaporan kinerja belum menyajikan analisis yang komprehensif pada setiap capaian indikator kinerja. Serta belum terdapat Upaya yang signifikan untuk mendorong adanya perbaikan atas catatan dan rekomendasi yang diberikan melalui evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berdasarkan hasil evaluasi oleh inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat catatan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow salah satunya adalah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi ditahun sebelumnya.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan (THLP) menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam upaya memastikan bahwa temuan-temuan yang dihasilkan melalui pemeriksaan tersebut dapat segera diperbaiki dan dijadikan dasar untuk perbaikan sistem yang lebih baik.⁵ Tujuan dari tindak lanjut atas hasil pengawasan antara lain adalah: a) meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah; b) mencegah terjadinya permasalahan atau kesalahan yang sama dan berulang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah; c) Memastikan bahwa Perangkat Daerah dan objek pemeriksaan lainnya memenuhi kewajiban hukum dan peraturan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan (THLP) menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam upaya memastikan bahwa temuan-temuan yang dihasilkan melalui pemeriksaan tersebut dapat segera diperbaiki dan dijadikan dasar untuk perbaikan sistem yang lebih baik.

Laporan hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, memuat rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti pada Tahun 2024. Tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP ditahun sebelumnya sangatlah penting karena menjadi salah satu sub komponen penilaian dalam komponen penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Selain itu, monitoring tindak lanjut atas hasil evaluasi periode sebelumnya merupakan salah tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP Perangkat Daerah.⁶

Dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024, secara garis besar dampak dari pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah

⁵ Herlinda¹,Sariana Damis², “Pemanfaatan Matrik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Vol.2, No.3 (2025)

⁶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

antara lain adalah : a) tidak ada peningkatan kualitas kinerja disebabkan tidak ada penyesuaian strategi, kebijakan dalam pencapaian target kinerja; b) tidak ada efisiensi dan efektifitas anggaran yang dialokasikan kepada perangkat daerah untuk mencapai target kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2023 dan tahun 2024, *policy brief* ini disusun untuk memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi serta saran rekomendasi kebijakan kepada Bupati Bolaang Mongondow dalam menyikapi hasil evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

TANTANGAN DAN PELUANG:

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah :

- Tidak semua unsur pada masing-masing Perangkat Daerah memahami pentingnya SAKIP beserta implementasinya dalam rangka pencapaian kinerja;
- Kurangnya kepedulian Perangkat Daerah untuk lebih memperhatikan substansi, integrasi dari dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja serta Pelaporan Kinerja.
- Pelaksanaan evaluasi AKIP diartikan oleh Perangkat Daerah hanya berupa pemenuhan dokumen sebagai gugur syarat kewajiban Perangkat Daerah untuk dilakukan evaluasi;
- Masih terdapat area perencanaan kinerja yang memerlukan penyempurnaan agar lebih terstruktur dan terintegrasi;
- Masih terdapat catatan yang menjadi masalah berulang yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
- Belum ada pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah dalam mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- Belum ada sanksi dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Daerah atas hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah.
- Belum ada monitoring dan evaluasi progres penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

Berdasarkan fakta lapangan dapat dilihat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, antara lain :

- Komitmen Bupati Bolaang Mongondow dalam menyikapi laporan hasil evaluasi AKIP sampai dengan tahap tindak lanjut rekomendasi;
- Peningkatan pemahaman dan kapasitas bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mengimplementasikan SAKIP;
- Optimalisasi koordinasi antar instansi dalam menyikapi hasil evaluasi AKIP;
- Penegakan hukum berupa regulasi yang tegas dari Bupati Bolaang Mongondow terhadap hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebagai bentuk *preasure* kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

REKOMENDASI KEBIJAKAN:

Berdasarkan hal-hal diatas, maka rekomendasi yang ditawarkan dan dapat menjadi bahan pertimbangan Bupati Bolaang Mongondow adalah :

✓ KOMITMEN

Komitmen Bupati Bolaang Mongondow dalam menyikapi hasil evaluasi AKIP dapat berupa pernyataan terbuka kepada Perangkat Daerah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Komitmen Bupati Bolaang Mongondow dalam menyikapi tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah juga dipandang penting sebagai bentuk **“warning”** kepada Perangkat Daerah agar lebih optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP. Pernyataan terbuka ini dapat disampaikan melalui media massa, pada pelaksanaan kegiatan apel kerja dan kegiatan pertemuan lainnya. Selain itu, bentuk komitmen kepala daerah dapat berupa pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

✓ KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

Bentuk kebijakan Bupati Bolaang mongondow dalam menyikapi hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat berupa menerbitkan Surat Keputusan/Peraturan Bupati tentang *Reward* dan *Punishment* atas hasil evaluasi AKIP.

Secara umum pemberian *reward dan punishment* ini menjadi salah satu bentuk apresiasi Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati selaku kepala daerah kepada Perangkat Daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kinerja, serta menjadi efek jera kepada Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berkomitmen meningkatkan kinerjanya. Kebijakan ini diharapkan menjadi motivasi bagi Perangkat Daerah agar lebih peduli dan konsisten dalam upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Bentuk reward dan punishment yang diterapkan dapat berupa pemberian tambahan alokasi anggaran atau pengurangan alokasi anggaran kepada Perangkat Daerah. Selanjutnya untuk teknis pemberian reward dan punishment ini dapat diatur berdasarkan prinsip objektif, adil dan transparan. Selain itu, bentuk *reward* lain yang dapat diberikan oleh Bupati Bolaang Mongondow kepada Perangkat Daerah adalah berupa pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah yang memperoleh nilai evaluasi terbaik. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal ini Bupati Bolaang Mongondow atas prestasi, kontribusi Perangkat Daerah sehingga menimbulkan rasa dihargai dan diakui. Diharapkan dengan pemberian penghargaan ini dapat menciptakan budaya kerja yang positif pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

✓ PELAKSANAAN KEGIATAN *FORUM GROUP DISCUSSION* / PANEL TENTANG HASIL EVALUASI AKIP

Kegiatan FGD ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas hasil sementara evaluasi AKIP Perangkat Daerah, catatan dan rekomendasi beserta tindaklanjutnya dan melakukan kajian dampak atas rekomendasi hasil evaluasi sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

✓ **PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP**

Sebagai salah satu upaya perbaikan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dipandang perlu melaksanakan kegiatan Pelatihan/Bimtek/Workshop tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam pentingnya SAKIP beserta implementasinya dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

✓ **MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Pemanfaatan teknologi informasi sangat memungkinkan untuk meminimalisir **human error** dan dapat meningkatkan keandalan serta keakuratan data. Pemanfaatan teknologi informasi ini dapat dilakukan melalui aplikasi terpadu yang menghimpun seluruh dokumen, baik dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan sehingga pelaksanaan evaluasi dari mulai tahap pengumpulan data, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi dapat dilakukan lebih cepat dan transparan oleh pihak yang berkepentingan.

KESIMPULAN

Tindak lanjut rekomendasi Evaluasi AKIP Perangkat Daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan *good governance*, karena melalui tindak lanjut atas rekomendasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Tindak lanjut yang efektif secara konkrit dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta mendorong perbaikan kinerja Perangkat Daerah lebih baik kedepan.

Besar harapan penulis bahwa rekomendasi kebijakan yang disarankan dapat menjadi bahan pertimbangan Bupati Bolaang Mongondow dalam menyikapi Laporan hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah serta pelaksanaan tindak lanjut oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional*
2. Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
3. Indonesia. *Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan.*
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/432/AA.05/2024 Tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.*
5. Herlinda, Sariana Damis, (2025), "Pemanfaatan Matrik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang" *Maximal Journal*, 2, No.3. (hal)

